

## **PERAN VISI DALAM MENGAWAL PROSES REFORMASI JATI DIRI BANGSA**

**Chandra T. Putra**

**KK Ilmu Kemanusiaan FSRD-ITB**

jackqrasph@yahoo.com

diterima Juni 2008, disetujui untuk dipublikasikan Juli 2008

### **Abstract**

*Speaking of a nation's identity, should be influenced by what it did in the past, its present condition, and what vision it has for the future. Nation's identity needs to be continuously reformed. Since way back from independence, Indonesia has been through an up and down with its development progress. Its history and present condition should be managed into a vision that can mobilize its people to step onto a better future. This article is meant for capturing a flash look at Indonesian past and present, some visions that have arose in Indonesia, and how those visions would be meant for its citizens to interpret it.*

### **Pendahuluan**

Sebagai suatu acuan berpikir, pertama kita harus mempertanyakan lagi, apakah bangsa Indonesia sudah memiliki visi untuk masa depan? Jika ada, apakah visi itu mungkin untuk dicapai dan dapat diukur tiap tahapan pencapaiannya? Jika bisa, lalu kita bertanya apakah visi tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia? Dan jika sudah dikenal, maka kita masih harus bertanya bagaimana setiap anak bangsa bisa mengambil peran di dalamnya untuk menjamin visi tersebut tercapai? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi esensi untuk mengevaluasi apakah sebagai sebuah bangsa, Indonesia akan mencapai

perubahan yang lebih baik di masa mendatang atau sebaliknya.

### **Memetakan Jati Diri Bangsa**

Pada masa lalu, Indonesia dikenal dengan perjuangannya memerdekakan dirinya setelah berabad-abad terkungkung oleh penjajahan. Setelah merdeka, Indonesia masih harus berjuang dengan mengalami jatuh bangun dalam bidang keamanan, politik dan ekonomi. Terjadinya gerakan separatis dalam negeri merentang dari awal-awal kemerdekaan hingga pada era reformasi. Terlepasnya Timor-Timur dan “kembali”-nya Aceh dan Papua ikut me-warnai sejarah Indonesia. Dalam hal politik kita juga

pernah mengalami berbagai pergeseran metode pemerintahan yang merentang dari demokrasi liberal, presidensiil, hingga parlementer, maupun gaya yang otoriter.

Secara ekonomi kita pernah dikenal sebagai salah satu macan asia di era 1980an, dengan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan. Dalam jangka waktu 1968-1998, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Salah satu keberhasilan dari era ini adalah laju inflasi yang bisa melunak dalam waktu tiga tahun berturut-turut. Dari kisaran angka 650% pada 1966 hingga relatif terkendali di angka 13%. Pertumbuhan ekonomi di masa Orde Baru rata-rata 6,8% setahun, bahkan sempat menyentuh angka 8,1% pada 1995. Perkembangan PDB per kapita Indonesia juga naik drastis. Pada 1968 PDB hanya US\$70, meningkat jadi US\$1.000 pada 1996.

Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem *trickle down effect* yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor internasional. Pemerataan ekonomi yang diharapkan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, sebagian besar seperti dituduhkan oleh sejumlah kalangan justru dinikmati oleh segelintir elit penguasa dan konglomerat.

Perubahan-perubahan yang terjadi di masa lalu, selain memberikan beban bagi masyarakat untuk terus beradaptasi juga memberikan sedikit demi sedikit

gambaran pada apa yang sebenarnya cocok untuk Indonesia. Kondisi masa kini dapat dipakai sebagai gambaran modal (dan beban) yang kita punyai untuk bergerak ke masa depan.

Walaupun pasca reformasi rakyat menikmati sistem politik yang lebih terbuka, desentralisasi yang sedang berkembang dalam bentuk otonomi daerah, dan meski Indonesia masih kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan, pendidikan, pengangguran, kependudukan, korupsi dan lain sebagainya. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa organisasi dunia telah menunjukkan posisi Indonesia yang sangat tertinggal dari negara-negara lainnya.

Sebanyak 8-9% dari angkatan kerja Indonesia berstatus menganggur. Presentase orang miskin pada tahun 2002 di Indonesia mencapai 7,5% dari total populasi jika kategori miskin dianggap berpendapatan kurang dari US\$1 per hari. Namun presentasinya akan melonjak menjadi 52,4% jika kategorinya dirubah menjadi US\$2 per hari. Di tahun yang sama pendapatan per kapita Indonesia sebesar US\$2790 (nominal). Dilihat dari bidang pendidikan, pada tahun 2006, sebanyak 7.43% dari populasi berumur 10 tahun ke atas tidak pernah mengenyam pendidikan, dan capaian pendidikan terbanyak yaitu SD sebesar 31.67%, padahal yang minimal tamat SMU hanya 22.56%. Urbanisasi menuju kota-kota besar yang masih hanya menciptakan kaum-kaum pinggiran baru. Sebagai pemungkas dilihat dari Indeks Persepsi

Korupsi, Indonesia masih saja bertahan di peringkat 143 dari 179 negara [6].

Dari berbagai indikator tersebut kita akan dengan mudah merasa menjadi bangsa yang tertinggal. Namun beberapa pengamat merasa bahwa sebenarnya kita sudah bukan lagi termasuk negara berkembang secara keseluruhan, pemerataanlah yang kurang berjalan dengan baik di negeri ini [5]. Ini adalah (sebagian) gambaran kekinian mengenai Indonesia yang dapat menjadi modal bagaimana kita mengelola negara ini ke depan.

### **Visi Indonesia ke Depan**

Masa depan yang penuh perbaikan dan kemajuan di berbagai bidang tentunya adalah impian masyarakat Indonesia, namun apa mau dikata beberapa ekonom internasional malah memprediksikan hal yang sebaliknya terjadi untuk Indonesia. Salah satunya adalah Michael Backman, yang dalam bukunya memprediksi masa depan yang suram untuk Indonesia [1]. Backman mendasarkan prediksinya pada beberapa hal yang dapat dirangkum sebagai berikut: (1) Walaupun upah buruh Indonesia murah, namun dengan hambatan birokrasi yang masih rumit dan korupsi di sana-sini, Indonesia menjadi tempat yang mahal untuk berbisnis; (2) Pendapatan utama negara yang berasal dari cadangan minyak dan gas yang terus menerus menurun; (3) Sejumlah besar orang kaya yang menguasai ratusan triliun aset finansial dan merupakan inti masyarakat bisnis Indonesia memilih untuk tinggal di luar negeri daripada di negaranya sendiri.

Generasi penerus Indonesia tentunya tidak ingin menyaksikan masa depan yang suram untuk negerinya. Karena itulah perencanaan dalam bentuk visi beserta implementasinya sangat diperlukan untuk mencapai masa depan yang lebih baik, bukan sebaliknya. Lalu apakah sejak jaman kemerdekaan Indonesia sudah memiliki visi? Mari kita lihat. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 adalah bentuk visi yang paling awal sejak jaman kemerdekaan di Indonesia. Walaupun mengalami beberapa amandemen pasca reformasi, sampai saat ini UUD 1945 dianggap menjadi acuan umum mengenai visi bangsa ke depan. Salah satu contohnya dapat kita lihat pada pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3 yang masih berlaku hingga saat ini, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini mewakili salah satu visi yang dicanangkan Bapak pendiri bangsa yaitu nasionalisasi aset-aset yang sifatnya strategis untuk hajat hidup bangsa. Kepemimpinan orde lama di era Soekarno pun mewakili semangat ini, walaupun panduan operasional belumlah dimiliki sehingga belumlah jelas apa dan bagaimana detail tujuan bangsa ini ke depan.

Pada masa Orde Baru visi pembangunan didasarkan pada Ketetapan MPR melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara/GBHN (sebelum Amandemen UUD 1945). Perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka pendek (tahunan), perencanaan

pembangunan jangka menengah (siklus lima tahunan) berupa Repelita dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahunan (PJP).

PJP pertama telah dilaksanakan sejak Repelita I sampai Repelita V, dari tahun 1969/1970 sampai 1993/1994, dilanjutkan dengan pelaksanaan PJP II, meliputi Repelita VI sampai X, dimulai tahun 1994/1995 - 2018/2019. Pada tahun ketiga Repelita VI, yaitu tahun 1997, terjadi krisis berkepanjangan yang membuyarkan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang II, sehingga Pelita VI dan VII tidak bisa lagi dilanjutkan.

Gagasan dan pikiran orde baru bertumpu pada pembangunan ekonomi agar apa yang tidak dikerjakan oleh orde lama segera teratasi. Lahirlah cetak biru pemerintahan orde baru yang secara garis besar bertumpu pada empat hal penting. Pertama, yaitu gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan jawaban atas kemiskinan dan pengangguran dan kemudian menjadi syarat mutlak bagi lahirnya stabilitas politik. Disinilah dikenal “politik pangan/beras” sebagai solusi dari kehancuran ekonomi yang melanda waktu itu. Kedua, yaitu visi politik sebagai panglima dirubah dengan ekonomi sebagai panglima. Pembangunan ekonomi menjadi prioritas dan acuan keberhasilan pemerintahan. Ketiga, yaitu visi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang ditopang oleh pemerintahan yang kuat. Keempat, visi negara integralistik dan kekeluargaan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan-keputusan penting.

Hasilnya, orde baru secara meyakinkan dapat mengurangi kemiskinan secara drastis. Investor asing berdatangan karena keran liberalisasi dibuka lebar untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Lapangan pekerjaan meluas sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Stabilitas politik terjadi walaupun demokratisasi terus-menerus dipertanyakan. Kebutuhan dasar masyarakat pun terpenuhi dengan mudah dan murah. Prestasi lain yang patut dicatat juga adalah kemampuan perangkat orde baru dalam mensosialisasikan visinya hingga ke ruang-ruang sekolah.

Namun apa nyana, di belakang berbagai kegermelapan tersebut tersimpan masalah yang ditumpuk-tumpuk seperti korupsi, ketidakefisienan birokrasi, kontrak pengelolaan sumber daya strategis dengan pihak asing yang merugikan, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi pemerataan pendapatan akhirnya meledak dikala krisis moneter 1997/1998 mengancam sebagian besar wilayah Asia.

Selanjutnya adalah masa transisi dari era Orde Baru ke era Reformasi. Mengingat pentingnya suatu perencanaan yang terarah dan terukur dalam jangka menengah dan panjang, maka pada periode transisi tersebut dikenal adanya perencanaan pembangunan menengah dengan nama Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 yang ditetapkan dengan UU No 25/2000. Perubahan politik besar era Reformasi sejak 1998 telah ikut mengubah sistem perencanaan pembangunan.

Dalam perkembangan era reformasi terjadi beberapa kali amandemen UUD 1945, sehingga tidak dikenal lagi adanya GBHN sebagai acuan sistem perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Akibatnya, tujuan utama dari visi negara sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 telaksana tanpa adanya perencanaan, maka prioritas sasaran menjadi tidak jelas, sehingga capaiannya tidak bisa diukur sebagai realisasi keinginan dan harapan dalam jangka tertentu.

Amandemen UUD 1945 yang merujuk Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dalam bentuk hukum undang-undang. Ini merupakan salah satu kesepakatan politik semua fraksi di MPR dan DPR periode 1999-2004 bersama pemerintah.

Setelah mengalami beberapa perubahan bentuk sampailah pemerintah pada sistem perencanaan pembangunan yang dianut mulai tahun 2004 yang memuat jangka lima tahunan dalam bentuk RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan jangka 25 tahun dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) serta penjabarannya dari skala nasional ke skala provinsi yang menuntut peran serta pemerintah daerah setempat. Selain versi pemerintah yang disahkan dengan Undang-Undang, visi mengenai bagaimana Indonesia ke depan juga mulai dikemukakan beberapa pihak.

Terdapat beberapa visi yang telah terdokumentasi dan dipublikasikan. Pertama, visi resmi pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: "Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur". Sasaran-sasaran pokok yang diambil dalam menggambarkan visi RPJP antara lain: terbentuknya perekonomian yang kokoh, dengan basis pertanian, pertambangan, manufaktur, dan jasa; Pendapatan per kapita pada 2025 mencapai sekitar US\$ 6000 dengan presentase penduduk miskin kurang dari 5%; kemandirian dan tersedianya jaminan pangan untuk masyarakat.

Kedua, Visi Indonesia 2030, yang berasal dari buah pikir Yayasan Indonesia Forum (YIF), yang memimpikan Indonesia menjadi "Negara maju yang unggul dalam pengelolaan kekayaan alam". Visi 2030 tersebut ditopang empat pencapaian utama, yaitu pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan, mendorong Indonesia supaya masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita sebesar US\$18.000/tahun, perwujudan kualitas hidup modern yang merata serta mengantarkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia dalam daftar *Fortune 500 Companies*. Diproyeksikan, kontribusi pertanian yang terus menurun akan digantikan sektor jasa yang akan mengungguli sektor industri mulai tahun 2025. Dengan kata lain, menurut visi ini sektor jasa akan menjadi penggerak

utama perekonomian menggantikan sektor industri.

Ketiga, visi versi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang ditulis dalam Visi 2030 dan Roadmap 2010 Industri Nasional. Visi KADIN, yang didukung riset sejumlah ekonom dan masukan berbagai asosiasi bisnis ini, memformulasikan Indonesia di tahun 2030 sebagai: "Negara Industri Maju dan Bangsa Niaga Tangguh". Visi tersebut dapat dicapai melalui: (1) kebangkitan kekuatan rekayasa, rancang bangun, manufaktur dan jaringan penjualan produk industri nasional, terutama dengan menghasilkan barang dan jasa berkualitas unggul yang menang bersaing dengan produk negaranegara di kawasan Asia seperti Vietnam, Malaysia, dan China, baik di pasar domestik maupun regional; (2) kebangkitan kekuatan industri nasional pengolah hasil sumber daya alam dengan produk olahan bermutu terjamin sehingga dapat dicapai swasembada pangan secara lestari dan berkemampuan ekspor; (3) kebangkitan daya cipta dan kreativitas rekayasa dan rancang bangun putra-putri Indonesia sehingga industri nasional berbasis tradisi dan budaya bangsa dapat tumbuh berkembang kembali melalui produk berkualitas tinggi yang dicintai dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai "life style" masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu tolok ukur pencapaian kemajuan adalah jika pertumbuhan perekonomian nasional sudah diatas 7%. Walaupun KADIN tidak memberikan capaian detail dalam pendapatan per kapita, namun dari data dan asumsi yang dipakai, tampak

diproyeksikan pertumbuhan pendapatan per kapita berkisar 6-7%.

Adakah kesamaan visi di antara ketiga dokumen tersebut? Meski ada berbagai misi dan strategi, tampaknya ketiganya punya visi yang sama menuju "Indonesia yang maju". Definisi Indonesia yang "maju" bisa dikuantitatifkan dengan indikator ekonomi dan sosial. Yang jelas, ketiganya ingin meletakkan arah yang objektif terhadap masa depan bangsa Indonesia dalam jangka panjang, suatu pandangan yang positif dan optimistis bahwa bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang terpancang di mata dunia internasional [2].

Namun jika kita dapat meng-kategorikan visi dari yang paling ambisius hingga yang paling realistis, kita akan mendapatkan visi YIF adalah yang paling ambisius. Dari tolok ukur yang ingin dicapai YIF memproyeksikan pertumbuhan rata-rata pendapatan per kapita sekitar 10%, mulai masuknya perusahaan asal Indonesia ke jajaran atas 500 perusahaan dunia, kemudian kuatnya peran sektor jasa menggantikan sektor industri. Walaupun batasan mengenai negara berkembang dan maju tidaklah tegas dan tolok ukur peran sektor jasa dalam perekonomian nasional di visi ini tidak dijelaskan dalam angka, namun beberapa kalangan menyebut kuatnya peran sektor jasa dalam perekonomian menjadi salah satu ciri dari negara maju [5]. Urutan yang paling realistis dilain pihak ditempati oleh visi RPJP yang banyak mendasarkan proyeksi ke depan pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pada saat-saat ini.

Terlepas dari perbedaan optimisme yang terasa dalam visi-visi tersebut, agaknya kita perlu mengingat bahwa layaknya seseorang yang akan menentukan arah pergi dari rumah, memiliki visi yang bermacam-macam dapat menimbulkan kebingungan dan mengakibatkan kerancuan dalam implementasi. Bangsa ini akan memilih yang mana? Memang dalam hal ini sifat resmi dimiliki oleh RPJP dengan disahkannya UU no. 17 tahun 2007, namun kita tetap perlu memperhatikan informasi yang terkandung dalam visi lainnya. Dan pada akhirnya adalah tugas kita juga untuk membentuk visi yang dapat diamini bersama, realistis (dalam arti mungkindicapai) tapi juga dapat menimbulkan semangat produktivitas dan harapan bagi masyarakat.

Dalam satu dan lain hal, RPJP sendiri pernah dipermasalahkan karena sifatnya yang ditakutkan akan mengekang visi pemerintah-pemerintah lanjutan pasca terbentuknya RPJP [4]. Wewenang DPR untuk merubah UU RPJP juga memberikan potensi ketidakpastian dalam acuan pembangunan, karena wajah DPR akan bergantung pada partai yang dominan pada tiap tahapan pemerintahan. Dalam hal ini, sekali lagi penulis memberikan argumentasi bahwa visi seharusnya bersifat lebih tinggi dari urusan formalitas, politik dan birokrasi mengingat bahwa sebenarnya motor penggerak dari visi tersebut adalah kesediaan masyarakat luas. Namun di sisi lain potensi masalah tersebut memberikan bukti bahwa visi yang dapat diamini bersama sangatlah dibutuhkan.

### **Menggerakkan Reformasi Membutuhkan Kemudahan Akses Informasi**

Jika kita bertanya pada orang di jalan, tahukah Anda apa visi bangsa Indonesia ke depan? Niscaya jika 1 dari 10 orang menjawab tahu dan dapat menjelaskannya kepada Anda, maka itupun sudah merupakan keberuntungan. Mengakses situs Bappenas, untuk kemudian men-*download* file yang berisi RPJP hanyalah dilakukan jika tidak oleh pengamat pemerintah, paling-paling akan dilakukan juga oleh bagian dari birokrasi, sangat eksklusif, begitu juga dengan visi 2030 versi Kadin. Bagaimana halnya dengan Visi Indonesia 2030? Visi yang dirasakan amat optimis oleh sebagian pengamat ini, setelah memasuki bulan ketiga sejak peluncuran Visi tersebut (Maret 2007), sangat jarang ditemukan media yang kembali mengupas dan memberitakan mengenai Visi 2030 tersebut.

Begitu pula dengan pemerintah maupun sang pengusung gagasan itu sendiri, inisiatif untuk mendistribusikan cita-cita bangsa jangka panjang tersebut belum juga terlihat hingga saat ini. Informasi tersebut seperti hanya dinikmati oleh lingkaran elit saja, padahal informasi itu sangat fundamental bagi segenap rakyat Indonesia sebagai pemenuhan hak dasarnya untuk mengetahui kemana masa depan mereka akan diarahkan. Lalu bagaimana seharusnya?

Kita bisa membandingkan dengan visi India 2020. Kenapa India? Pertama, kedua negara (Indonesia dan India) mempunyai kondisi dan karakter yang

serupa, sama-sama berangkat dari kategori negara ketiga, juga kemiskinan dan kependudukan masih menjadi permasalahan utama ke dua negara tersebut, jadi secara umum kedua negara membutuhkan sebuah visi baru untuk disosialisasikan. Kedua, walaupun berangkat dari kondisi yang mirip, saat ini India diprediksi oleh para pakar dunia akan tumbuh menjadi negara dengan ekonomi super power dalam 20 hingga 30 tahun mendatang.

Pendistribusian informasi mengenai Visi India 2020 di seluruh lapisan masyarakat India patut menjadi contoh bagi kita semua. Baik sebelum maupun sesudah terwujudnya Visi 2020, pemerintah India melakukan sosialisasi secara gencar kepada semua elemen bangsa [3]. Hal tersebut dilakukan melalui seminar dan kampanye yang melibatkan media cetak maupun elektronik secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sumber buku utama penyusunan Visi 2020 karya Presiden Abdul Kalam dapat dengan mudah ditemukan hampir di setiap toko buku di India, baik dalam kios-kios resmi maupun kios jalanan yang dibuka oleh para pedagang kaki lima. Maka bukanlah hal yang mengherankan apabila sebagian besar masyarakat India, jika belum membaca setidaknya mereka tahu dan pernah mendengar sekilas akan substansi buku tersebut. Begitu pula dengan Visi 2020 yang sudah dikodifikasikan oleh *Planning Commission of India*, siapapun dapat memperolehnya hanya dengan mendownload pada website resminya. Bahkan ada beberapa pihak yang turut berperan serta membuat suatu situs yang memberikan informasi khusus mengenai

berbagai hal seputar visi tersebut. Oleh sebab itu, setiap rakyat India dapat dengan mudah mengakses informasi yang ada di dalam Visi tersebut, baik dalam rangka mengkritisi maupun menjadikannya sebagai pedoman pelaksanaan programnya masing-masing semata-mata guna menunjang pencapaian Visi India 2020 [7,8].

Indonesia seharusnya bisa mencontoh gaya sosialisasi yang intens ala India ini. Hal ini penting mengingat bahwa masyarakat perlu diingatkan bahwa negara yang mereka diami selama ini adalah negara yang mempunyai visi, sehingga masyarakat dapat ikut menaruh peran mereka masing-masing dalam perubahan kondisi bangsa, maupun dalam mengkritisi dan menyempurnakan visi tersebut.

## **Kesimpulan**

Penulis dalam hal ini mengajak pembaca untuk kembali pada halaman pendahuluan tulisan ini yang berisi beberapa pertanyaan berikut: Apakah bangsa Indonesia sudah memiliki visi untuk masa depan? Jika ada, apakah visi itu mungkin untuk dicapai dan dapat diukur tiap tahapan pencapaiannya? Jika bisa, lalu kita bertanya apakah visi tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia? Dan jika sudah dikenal, maka kita masih harus bertanya bagaimana setiap anak bangsa bisa mengambil peran di dalamnya untuk menjamin visi tersebut tercapai? Jika salah satu dari tiap hal tersebut belum dapat dijawab dengan tegas, maka proses memobilisasi bangsa dan mencapai masa depan yang cerah



sepertinya masih akan mendapat berbagai hambatan.

### **Daftar Pustaka**

Backman, Michael. 2008. *Asia Future Shock*. Ufuk Press.

Faiz, Pan Mohammad. *Meneropong Visi Bangsa: Analisa Kritis Visi Indonesia 2030 vis-a-vis Visi India 2020*. Jurnal Visi PPI India No. 1 Vol. IX, 2007.

Kuncoro, Mudrajad. *Visi Indonesia 2030: Quo Vadis? Koran Seputar Indonesia*, 18 Oktober 2007.

Rudy, Teuku M. 2004. *Masalah Negara Berkembang, Suatu Kajian Ekonomi Politik Internasional*. Ramadhan Citra Grafika.

Silalahi, Harry Tjan. *Rencana Pembangunan 2005 – 2025*. Kompas, 3 Agustus 2005.

Berbagai situs online sumber data statistik: BPS, IMF, Transparency International, dan World Bank.

[www.indiavision2020.org](http://www.indiavision2020.org)

[www.dreamindia.org](http://www.dreamindia.org)

[www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id)

<http://indforum.org>

[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)